

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan dan pelaksanaan pengawasan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pamekasan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis pembangunan fisik menggunakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026, Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025, dan Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi digunakan untuk menganalisis pengawasan terhadap aspek legalitas, kelembagaan, usaha, aset, sarana dan prasarana, serta kesiapan operasional koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengawasan koperasi merupakan kewenangan pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi dan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi, namun dalam praktik pembangunan fisik keterlibatan Kodim dan Babinsa lebih dominan dibandingkan Dinas Koperasi sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Hambatan pengawasan meliputi ketidakjelasan koordinasi dan pembagian kewenangan, keterbatasan pengawas, anggaran dan sumber daya manusia, serta rendahnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan sebagai *leading sector*, penegasan kewenangan antarinstansi, peningkatan kapasitas pengawas, serta mekanisme pengawasan yang terintegrasi, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan menempatkan Kodim dan Babinsa sebagai unsur pendukung sesuai kewenangannya.

Kata Kunci: Pengawasan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pembagian Kewenangan, Pemerintah Daerah, Kabupaten Pamekasan.

Abstract

This study aims to analyze the distribution of authority and the implementation of supervision over the physical development of the Merah Putih Village/Subdistrict Cooperatives in Pamekasan Regency, as well as to identify factors that hinder the implementation of such supervision. This research employs an empirical legal research method using statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were obtained through interviews, observations, and literature studies and were analyzed using a qualitative descriptive method. The analysis of physical development refers to Presidential Instruction Number 17 of 2025 concerning the Acceleration of the Physical Development of Outlets, Warehouses, and Supporting Facilities for Merah Putih Village/Subdistrict Cooperatives, Minister of Finance Regulation Number 15 of 2026, Minister of Cooperatives Circular Letter Number 4 of 2025, and Minister of Cooperatives Guideline Number 1 of 2026. Meanwhile, Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives and Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulation Number 9 of 2020 concerning Cooperative Supervision are used to analyze the supervision of cooperatives in terms of legality, institutional governance, business activities, assets, facilities and infrastructure, and operational readiness. The findings indicate that, normatively, cooperative supervision falls under the authority of local governments through the regional agency responsible for cooperatives and Functional Cooperative Supervisory Officers. However, in the implementation of physical development, the involvement of the District Military Command (Kodim) and Village Military Non-Commissioned Officers (Babinsa) is more dominant than that of the Cooperative Office, potentially resulting in overlapping authorities. The obstacles to supervision include unclear inter-agency coordination and division of authority, limited numbers of supervisory officers, insufficient operational budgets and human resources, as well as low levels of transparency and community participation. Therefore, it is necessary to strengthen the Pamekasan Regency Office of Cooperatives, SMEs and Manpower as the leading sector, clarify the distribution of authority among institutions, improve supervisory capacity, and establish an integrated, transparent, accountable, and sustainable supervision mechanism, with the Kodim and Babinsa positioned as supporting elements in accordance with their respective authorities.

Keyword: Supervision, Merah Putih Village/Urban Village Cooperatives, Division of Authority, Local Government, Pamekasan Regency.

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PEMBAGIAN KEWENANGAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN FISIK KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DI KABUPATEN PAMEKASAN”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura. Skripsi ini menggunakan data penelitian secara langsung yang dilatarbelakangi oleh kondisi perkembangan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ada di Pamekasan. Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai proses pengawasan serta perkembangan Koperasi yang ada. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kelancaran, kemudahan jalan berproses, kesempatan berkembang individu yang sangat luar biasa bagi penulis untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas Trunodjoyo Madura sampai akhirnya dapat menyelesaikan segala persyaratan akademis dengan baik;
2. Rasulullah SAW, sebagai panutan dalam hidup berkeimanan dan selalu di jalan yang benar;
3. Kedua Orang Tua, serta seluruh keluarga yang selalu mendukung penulis baik secara mental, biaya, dan segala perbuatan baik saya serta menuntun agar terus tetap menjadi pribadi yang baik dan beretika;
4. Zilda Khilmatus Shokhikhah, S.H., M.H., yang telah membimbing skripsi kepada penulis dengan sangat cermat dan teliti;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik;
6. Seluruh narasumber yang telah bersedia memberikan informasi dan wawancara;
7. Rekan sehati dan seperjuangan, Arief Anshori, Khozi, Fazil Mubaarok, Rahmad Alief Pharmadi, dan Ibnu Nafi, yang telah menemani serta membantu dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi penulis;

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang tertarik untuk membaca dan meneliti tentang pengawasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Bangkalan,.....

Fahrur Rosi

Daftar Isi

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
Abstrak.....	v
<i>Abstract</i>.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	19
2.1 Teori Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>)	19
2.2 Teori Pengawasan	23
2.3 Teori <i>Good Governance</i>	28
2.4 Teori Pembagian Kekuasaan.....	32
BAB III PEMBAHASAN	37
3.1 Pembagian Kewenangan Dan Efektivitas Pengawasan Pembangunan Fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Berdasarkan Kepastian Hukum.	37
3.2 Faktor Hukum Yang Di Hadapi Pemerintah Dalam Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Di Kabupaten Pamekasan.....	57
BAB IV PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran.....	74

PEDOMAN WAWANCARA.....	76
LAMPIRAN.....	78
Daftar Pustaka.....	82

Daftar Tabel

Tabel 3. 1 Pembagian Tugas Dalam Pembangunan Fisik Koperasi	
Desa/Kelurahan Merah Putih	42
Tabel 3. 2 Temuan Empiris Berdasar Keterangan Pihak Terkait	47
Tabel 3. 3 Konsep Ideal Pada Tahap Pengawasan	65